

**EFEKTIVITAS PROSES PENILAIAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT
PADA PUSAT PELATIHAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
PERIODE PERTAMA TAHUN 2020**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh
gelar Sarjana Terapan dalam Ilmu Administrasi Negara**

DISUSUN OLEH :

NAMA : NURCHOLIS

NPM : 1732013167

PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI BISNIS SEKTOR PUBLIK



**PROGRAM SARJANA TERAPAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
JAKARTA
2020**

**POLITEKNIK SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN

NAMA : NURCHOLIS
NPM : 1732013167
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI BISNIS SEKTOR PUBLIK
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS PROSES PENILAIAN ANGKA
KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT
PADA PUSAT PELATIHAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
PERIODE PERTAMA TAHUN 2020

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan
pada tanggal 18 Desember 2020

Pembimbing



(Dr.A Rina Herawati, M.Si)

LEMBAR PENGESAHAN

Diperiksa dan disahkan oleh Tim Penguji Ujian Skripsi Sarjana Terapan

Politeknik STIA LAN Jakarta

tanggal 18 Desember 2020

Ketua merangkap anggota,

(Drs.Agoes Inarto, MM)



Sekretaris merangkap anggota

A handwritten signature in blue ink, belonging to Keisha Dinya S, ST, MAB.

(Keisha Dinya S, ST, MAB)

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nurcholis
NPM : 1732013167
Program Studi : Administrasi Bisnis Sektor Publik

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang telah saya buat dengan judul EFEKTIVITAS PROSES PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT PADA PUSAT PELATIHAN MASYARAKAT KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI PERIODE PERTAMA TAHUN 2020 merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Politeknik STIA LAN Jakarta

Demikina pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Jakarta, 07 Desember 2020

Penulis,



(Nurcholis)

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat mencapai gelar sarjana terapan pada Politeknik STIA Lembaga Administrasi Negara Jakarta.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak bisa terselesaikan tanpa pihak-pihak yang mendukung baik secara moril maupun materil. Maka penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada :

1. Orang tua yang tercinta yang selalu memberikan dukungan do'a untuk penulis.
2. Istri dan anak-anak tercinta yang selalu memberikan dorongan semangat dan do'a bahkan ikut membantu menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu DR.A Rina Herawati, M.Si selaku dosen pembimbing Skripsi yang telah dengan sabar membimbing dan mengarahkan selama bimbingan hingga selesainya skripsi ini.
4. Bapak Drs.Agoes Inarto, MM, selaku Kepala program studi Administrasi Bisnis Sektor Publik Politeknik STIA LAN Jakarta, yang dengan telatennya memberikan bimbingan dan dorongan semangat hingga selesainya skripsi ini.

5. Bapak Mukhlis, S.Sos , selaku pendamping Program Studi ABSP yang selalu memperlancar proses tahapan penyelesaian skripsi.
6. Bapak Drs.Andi M.Urwah, M.Si selaku atasan langsung Kepala Bidang Kerjasama dan Pemberdayaan Puslatmas yang telah memberikan dukungan penuh dan keleluasaan dalam mengerjakan sekripsi ini.
7. Rekan kerja Bidang Kerjasama dan Pemberdayaan Pusat Pelatihan Masyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang telah membantu menyediakan data dan memberikan dorongan semangat dalam menyelesaikan sekripsi ini.
8. Rekan -rekan kuliah jurusan ABSP Politeknik STIA LAN Jakarta yang telah memberikan kerjasamanya selama penyusunan sekripsi ini.
9. Segenap staf dan karyawan Politeknik STIA LAN Jakarta yang memperlancar pengerjaan Skripsi ini.
10. Seluruh Bapak Ibu dosen Jurusan ABSP Politeknik STIA LAN Jakarta.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang telah penulis susun ini jauh dari sempurna hal ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh sebab itu penulis mengharapkan adanya saran dan masukan bahkan kritik membangun dari semua pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi Pusat Pelatihan Masyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Jakarta, 6 Desember 2020

Penulis

(NC)

ABSTRAK

Nurcholis, 1732013157

EFEKTIFITAS PROSES PENILAIAN ANGKA KREDIT
JF PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT PADA
PUSAT PELATIHAN MASYARAKAT KEMENTERIAN
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRASI PERIODE PERTAMA TAHUN
2020

Skripsi, 73 halaman

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah instansi pembina bagi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM). Salah satu tugasnya adalah melaksanakan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dengan tujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karir.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas proses penetapan hasil penilaian angka kredit Jabatan Fungsional PSM pada Pusat Pelatihan Masyarakat .Kementerian Desa, PDTT.

Adapun hal yang diteliti dalam penelitian ini terkait dengan efektivitas proses dan tahapan persiapan, pelaksanaan, penetapan penilaian, pendistribusian PAK, serta permasalahan yang ada selama pelaksanaan penilaian.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun analisis data yang dilakukan adalah melalui observasi, penelaahan dokumen dan peraturan perundang-undangan, serta wawancara kepada *key informant*.

Hasil penelitian menemukan adanya :

1. Pada aspek proses Penilaian Angka Kredit JF Penggerak Swadaya Masyarakat periode Pertama ini sudah dilaksanakan dengan baik oleh Puslatmas, namun masih kurang efektif.
2. Pada aspek tahapan Penilaian Angka Kredit JF Penggerak Swadaya Masyarakat periode Pertama ini sudah dilaksanakan dengan baik oleh Puslatmas, namun masih kurang efektif.

Oleh karena itu penulis memberikan saran untuk menyusun sistem informasi berbasis aplikasi dan website bagi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat agar lebih terintegrasi dan memudahkan proses Penilaian Angka Kredit JF PSM dan lebih efektif.

Kata kunci : Angka Kredit, penilaian kinerja, aplikasi kinerja

ABSTRACT

Nurcholis, 1732013167

*THE EFFEKTIVENESS OF THE PROCESS OF
ASSESSING CREDIT NUMBERS FOR FUNCTIONAL
POSITIONS AS A NON-GOVERMENTAL
ACTIVATOR AT THE COMMUNITY TRAINING
CENTRE OF THE VILLAGE MINISTRY,
DEVELOPMENT OF DISADVENTAGED AREAS
AND TRANSMIGRATION FOR THE FIRST PERIOD
OF 2020*

Thesis, 73 pages

The Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Areas and Transmigration is the supervisory agency for the Functional Position for Community Self-Help Movers. One of its duties is to carry out an Assessment of the Functional Position of a Non-Governmental Organization Functional Position with the aim of ensuring the objectivity of coaching based on an achievement and a career system.

This study aims to determine the effectiveness of the process of determining the results of the Non-governmental activator Functional Position credit score assessment at the Community Training Center, Village Ministry, Develepment of Disadvantaged Areas and Transmigration.

The things examined in this study are related to the effectiveness of the process and stages of preparation, implementation, determination of the assessment, distribution of Assessing Credit Numbers, as well as the problems that existed during the implementation of the assessment.

The research method used in this research is a qualitative descriptive approach. The data analysis carried out is through observation, review of documents and legislation, and interviews with key informants.

The results of the literature study found:

- 1. In the first period of the FP Self-Help Activator Credit Score Assessment process, Community Training Center has implemented it well, but is still not effective.*
- 2. In the first period of the FP Self-Help Activator Credit Score Assessment phase, Community Training Center has implemented it well, but is still not effective.*

Therefore, the authors provide suggestions for compiling an application-based information system and a website for the Functional Position for Community Self-Help Movers to be more integrated and facilitate the Non-governmental activator functional position Credit Score Assessment process and more effectively.

Keywords: Credit score, performance appraisal, performance application

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
PERNYATAAN	vii
BAB I : PERMASALAHAN PENELITIAN	
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Fokus Permasalahan	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Bagi Kepentingan Dunia Akademik	8
2. Manfaat Bagi Kepentingan Dunia Praktik	8
BAB II : KERANGKA TEORI	
A. Tinjauan Teori.....	9
1. Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat	9
a. Tugas Jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat	9
b. Pengertian Pemberdayaan masyarakat	10
2. Jabatan Fungsional	11
a. Jenis-Jenis Jabatan Fungsional	12
b. Rumpun Jabatan Fungsional.....	12
3. Penilaian	13
4. Angka Kredit	14
5. Konsep Kinerja, Administrasi Bisnis dan Efektifitas	15
a. Kinerja	16
b. Administrasi Bisnis	16
c. Efektifitas.....	19
6. Proses	21
a. Tujuan Proses	22
b. Desain Proses	22
c. Kinerja Proses	23

B. Konsep Kunci.....	23
C. Model Berpikir	23
D. Pertanyaan penelitian	24
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	
A. Metode Penelitian	25
B. Teknik Pengumpulan Data.....	26
C. Metode Pengolahan Data	34
BAB IV : HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	37
1. Sejarah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.....	37
2. Struktur Organisasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	39
3. Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi	41
4. Pusat Pelatihan Masyarakat.....	42
5. Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya masyarakat...	44
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	44
1. Aspek Proses Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat	45
2. Aspek Efektivitas Tahapan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Periode Pertama tahun 2020.....	51
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendesa, PDTT) No.6 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara.

Dalam melaksanakan tugasnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal, penyiapan, pembangunan permukiman, dan pengembangan kawasan transmigrasi;
- b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

- c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta pengelolaan informasi di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
- g. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Sesuai dengan fungsi Kementerian Desa, PDTT dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, Kementerian Desa, PDTT memiliki Unit Pelaksana Tugas berupa Balai Latihan Masyarakat (BLM) yang berjumlah delapan BLM dan tersebar di beberapa daerah. Di dalam Balai Latihan Masyarakat

terdapat Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) yang melaksanakan tugas pelatihan, penyuluhan dan pendampingan masyarakat.

Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) adalah Jabatan Fungsional Tertentu yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 58 Tahun 2004 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat, sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 28 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat. Keberadaan Jabatan fungsional PSM tidak hanya di Balai Latihan Masyarakat Kementerian Desa, PDTT saja tetapi mereka juga ada di Kementerian Desa, PDTT yang tersebar di beberapa satuan kerja unit eselon satu dan eselon dua, juga di satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baik provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Permen PAN RB) Nomor 28 Tahun 2018, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah instansi pembina bagi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM). Sebagai instansi Pembina Jabatan Fungsional PSM, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mempunyai tugas dan kewenangan untuk mengadakan pembinaan, meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia, menyusun regulasi, juga

melakukan Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dengan tujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier. Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang di capai, serta perilaku PNS, dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipasif, dan transparan.

Permendesa, PDTT no 6 tahun 2015 dalam pasal 1010 menyebutkan bahwa Pusat Pelatihan Masyarakat (Puslatmas) mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan masyarakat serta kerja sama di bidang pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Dalam melaksanakan tugasnya Pusat Pelatihan Masyarakat menyelenggarakan fungsi penyiapan pelaksanaan pengembangan jabatan fungsional di bidang pelatihan masyarakat. Jabatan fungsional yang di maksud adalah Penggerak Swadaya Masyarakat.

Dalam pengembangan karir JF PSM, sebagai syarat untuk kenaikan pangkat dan Jabatan diperlukan Angka Kredit. Pengertian Angka Kredit berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara – Reformasi Birokrasi No 28 tahun 2018 dituangkan dalam Bab I ketentuan umum, pasal 1 angka (23) adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh

Penggerak Swadaya Masyarakat untuk pembinaan karier yang bersangkutan

Kegiatan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional PSM dilakukan dua priode dalam satu tahun. Tahun anggaran 2020 Puslatmas sesuai dengan Kerangka Acuan kerja (KAK) melaksanakan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional PSM dua periode. Periode pertama dilaksanakan bulan Januari 2020 sedangkan periode kedua dilaksanakan pada bulan Juli 2020.

Dalam rangka penilaian angka kredit ada beberapa tahapan yang merupakan prosedur melaksanakan sebelum dan sesudah proses penilaian. Proses tahapannya tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Puslatmas. Dalam KAK kegiatan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional PSM direncanakan waktunya antara bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2020. Hal tersebut juga mempertimbangkan hasil Penetapan angka Kredit dapat di jadikan syarat kenaikan Jenjang maupun kenaikan pangkat.

Namun dalam rangkaian kegiatan yang di targetkan selesai dalam bulan Maret 2020 mengalami beberapa kendala antara lain dalam proses penetapan PAK nya setelah dilakukan rapat pleno pada saat pelaksanaan penilaian. Sehingga proses penyampaian hasil PAK nya kepada para Pejabat Fungsional PSM menjadi terlambat dari waktu yang sudah direncanakan. bahkan sampai bulan Juni pada saat penulis

menyusun tugas akhir ini, masih ada beberapa hasil PAK yang belum terkirim. Hal tersebut bisa di lihat dari table berikut ini.

Tabel 1.1 Tabel rekapitulasi pendistribusian/pengiriman PAK hasil penilaian angka kredit Jabatan Fungsional PSM periode I tahun 2020

BULAN	JUMLAH PAK TERKIRIM
April	40
Mei	18
Juni	34
Jumlah	92

Sumber :Database Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Pusat Pelatihan Masyarakat Kementerian Desa, PDTT.

Sedangkan hasil penetapan PAK yang belum terkirim sampai saat penulis menyusun tugas akhir ini masih terdapat 39 PAK ke pejabat PSM yang tersebar di beberapa wilayah provinsi di Indonesia.

Lamanya proses penetapan hasil angka kredit berupa penandatanganan oleh pejabat yang berwenang menjadi kendala yang berakibat pada terlambatnya pendistribusian atau pengiriman hasil PAK kepada para pejabat PSM yang tentunya berpengaruh juga pada mereka yang akan naik pangkat maupun naik jenjang

Permasalahan lainnya adalah pelaksanaan pemasukan (*input*) data hasil penilaian yang juga berkontribusi pada bertambah panjangnya

proses penyampaian atau pengiriman hasil Penilaian pada para Pejabat fungsional PSM.

Berdasarkan latar belakang masalah yang terdapat dalam pelaksanaan kegiatan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional PSM tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **Efektivitas Proses Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat pada Pusat Pelatihan Masyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Periode Pertama Tahun 2020.**

B. Fokus Permasalahan

Berdasarkan permasalahan yang telah dituliskan pada latar belakang permasalahan tersebut di atas, fokus permasalahan yang diajukan dalam Skripsi ini: Bagaimana efektivitas proses penetapan hasil penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat pada Pusat Pelatihan Masyarakat Kementerian Desa, PDTT?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui efektivitas proses penetapan hasil penilaian angka kredit Jabatan Fungsional PSM pada Pusat Pelatihan Masyarakat Kementerian Desa, PDTT. Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak di capai, penulis berharap agar penelitian

ini dapat memberikan manfaat dalam hal penilaian angka kredit Jabatan Fungsional PSM periode pertama tahun 2020

1. Manfaat Bagi Kepentingan Dunia Akademik

Secara akademik hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumbangan pemikiran dan referensi untuk penelitian penelitian mengenai penilaian angka kredit Jabatan Fungsional PSM pada Pusat Pelatihan Masyarakat Kementerian Desa, PDTT

2. Manfaat Bagi Kepentingan Dunia Praktik

Secara praktik penelitian ini dapat bermanfaat dalam memberikan fakta dan masukan mengenai efektivitas proses penilaian angka kredit Jabatan Fungsional PSM periode pertama tahun 2020 pada Pusat Pelatihan Masyarakat kementerian Desa, PDTT.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan umum, bahwa efektivitas Penilaian Angka Kredit JF Penggerak Swadaya Masyarakat Periode Pertama tahun 2020 berjalan dengan baik dengan target seluruh Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) keseluruhannya dapat dinilai begitu juga hasil penetapan Angka Kredit JF PSM selesai terdistribusikan kepada pejabat PSM yang mengirimkan DUPAK. Adapun kesimpulan terinci untuk masing-masing aspek penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Aspek proses Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Periode Pertama tahun 2020 telah dilaksanakan dengan baik oleh Pusat Pelatihan Masyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi .Namun dari proses tersebut berdasarkan temuan yang ada dilaporkan masih ada permasalahan terkait dengan jumlah tim penilai .Tim penilai yang efektif menilai masih kurang jumlahnya dibanding dengan dokumen DUPAK yang dinilai.
2. Aspek efektivitas tahapan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat periode pertama tahun 2020 yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu pada tahapan

pembentukan tim penilai, sosialisasi dan rekapitulasi DUPAK, sebagian berjalan dengan efektif dan sesuai dengan perencanaan. Tetapi proses pemasukan data (*input*) pada formulir Penilaian Angka Kredit juga penandatanganan hasil Penilaian oleh pejabat berwenang mengalami beberapa kendala sehingga mengalami keterlambatan dari waktu yang sudah direncanakan. Hal tersebut dikarenakan oleh keterbatasan petugas yang memasukan data (*input*) juga karena kesibukan dan kurang kordinasinya dengan pejabat yang berwenang menandatangani hasil penilaian

B. Saran

Atas beberapa permasalahan yang ada baik pada proses maupun tahapan Penilaian Angka kredit JF Penggerak Swadaya masyarakat periode pertama tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Pusat Pelatihan Masyarakat kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, penulis memberikan saran yaitu :

1. Pada aspek proses penilaian Angka Kredit JF PSM, Tim Penilai Angka Kredit Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat semua jenjang harus ditambah lagi jumlahnya terutama dari unsur praktisi, karena merekalah yang efektif dalam prakteknya menilai DUPAK JF Penggerak Swadaya Masyarakat. Untuk penilai jenjang Ahli madya dan Utama, penambahan dari unsur praktisi dua orang

setiap periode penilaian dan disesuaikan dengan perhitungan peningkatan jumlah PSM Ahli madya dan Ahli Utama .

Sedangkan pada jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda saat ini berjumlah tujuh penilai. Dari tujuh penilai hanya empat penilai yang efektif dalam prakteknya menilai DUPAIK . Untuk penilai jenjang ahli pertama dan ahli muda penambahan dari unsur praktisi adalah empat orang setiap periode penilaian dengan pertimbangan jumlah PSM ahli Pertama dan Ahli Muda jumlahnya lebih banyak dari PSM ahli madya Utama, disesuaikan dengan perhitungan peningkatan jumlahnya. Saran ini berdasarkan observasi dan wawancara kembali dengan para tim penilai bahwa idealnya satu penilai menilai empat dokumen DUPAIK dalam satu hari kerja.

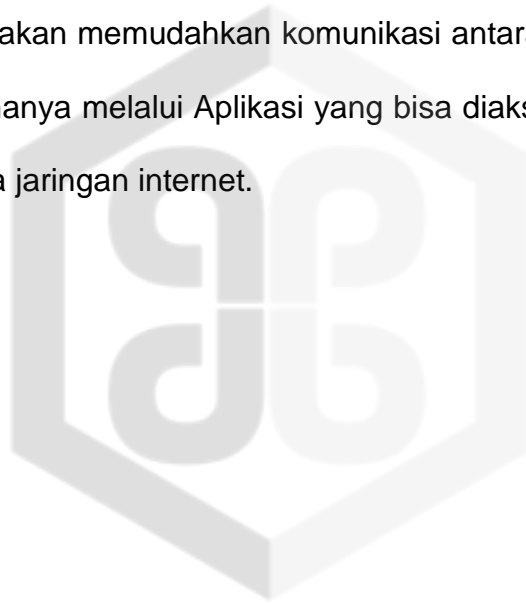
2. Pada aspek tahapan penilaian Angka Kredit Sudah saatnya dirancang sebuah sistem informasi terpadu yang berbasis aplikasi ataupun website yang dapat memberikan informasi secara cepat dan langsung (secara online). Sistem informasi tersebut juga merupakan data base informasi berkaitan dengan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat. Sistem informasi ini menyediakan informasi layanan berupa laporan periodik, informasi khusus maupun data PSM yang berkaitan dengan Penilaian Angka Kredit, data seluruh PSM yang ada di semua kementerian lembaga, maupun PSM yang ada di instansi daerah diseluruh Indonesia.

Sistem ini akan memudahkan :

- a. Pada tahap sosialisasi tidak perlu lagi mengirimkan surat ke setiap instansi pengumuman jadwal pengumpulan dokumen DUPAK, cukup diumumkan di beranda web ataupun Aplikasi. Hal ini juga akan mengurangi resiko tidak tersampainya informasi tersebut kepada para pejabat PSM.
- b. Tahap pemasukan data (*input*) dilakukan cukup satu kali pada saat mendaftarkan dokumen DUPAK yang masuk. Dalam aplikasi dirancang secara sistematis akan *terkoneksi* dengan formulir Penetapan Angka Kredit, sehingga pada saat selesai sidang pleno penentuan nilai akhir *operator* bisa langsung memasukkan data nilai akhirnya. Dibandingkan pemasukan data secara manual yang biasanya waktunya bisa satu bulan lebih maka dengan sistem aplikasi ini dirancang cukup satu hari pada saat selesai sidang pleno penilaian.
- c. Jika memungkinkan hasil penetapan angka kredit pada formulir PAK dirancang untuk menggunakan tandatangan elektronik *QR-Code*, sehingga dapat memudahkan dalam proses penandatanganan pejabat berwenang, tapi tentunya harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan pejabat tersebut.
- d. Pada proses pendistribusian formulir penetapan Penilaian Angka Kredit tidak perlu di kirim secara manual seperti yang telah berjalan yaitu dengan mengirimkan melalui jasa

pengiriman surat, tetapi cukup di unduh oleh PSM yang berangkat pada aplikasi tersebut.

Sistem ini juga akan memudahkan komunikasi antara PSM dengan Instansi pembinaanya melalui Aplikasi yang bisa diakses dimanapun berada asal ada jaringan internet.



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR PUSTAKA

a. Daftar Referensi Buku-Buku

Abdurrahmat, Fathoni (2006) *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung : Rineka Cipta

Anggito, Albi dan Setiawan, Johan (2018) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi : CV. Jejak

Arikunto, Suharsimi (2000) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : CV Jejak

Handoko, Hani T (2003) *Manajemen*, Yogyakarta : BPFE Yogyakarta

Irma, Erawati, dkk. (2017) *Efektivitas Kinerja Pegawai pada Kantor Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa*. Jurnal Office, Vol.3, No.1, 2017

Irawan, Prasetya. (2006). *Analisi Kinerja*. Jakarta : STIA LAN Press

Liang Gie (2004) *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta : Yayasan Studi Ilmu dan Teknologi

Moleong, Lexy (2017) *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung : PT Remaja Rosdakarya

Maulana, M., & Rachman, B. (2016). *Harga pembelian pemerintah (HPP) gabah-beras tahun 2010: Efektivitas dan implikasinya terhadap kualitas dan pengadaan oleh Dolog*. Analisis Kebijakan Pertanian, 9(4), 331–347.

Othenk (2008) *Pengertian Efektivitas dan Landasan Teori Efektivitas*.

tersedia di <http://literaturbook.blogspot.co.id/2016/03/pengertian-efektivitas>

Prastowo .Andi (2011) *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*.Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Rahadhitya, R., & Darsono, D. (2015).*Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Audit Internal (Studi Pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah)*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis

Robbins, S. P. (1996). *Teori Organisasi: Struktur, Desain dan Aplikasi Terjemahan, PT. Prenhallindo*, Jakarta. Broad Scope Timeliness Agregation Integration

Schein, E. H. (2010). *Organizational culture and leadership (Vol. 2)*.John Wiley & Sons.

Sheldon, dan Urwick (1929) *Pengertian Administrasi Bisnis (Niaga), Tujuan, Karakteristik, dan Ruang Lingkup Administrasi Bisnis (Niaga)* blog Abi Asmana, diperoleh dari :

<http://legalstudies71.blogspot.com/2019/11/pengertian-administrasi-bisnis-niaga.html>

Siagian, Sondang P (2004) *Teori Motivasi dan Aplikasinya*, Jakarta : Rineka Cipta

Sukamdinata, Nana Saodih, (2011), *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*, Bandung : Remaja Rosdakarya

Wayong, J.(2004) *Fungsi Administrasi Negara*, Jakarta : Djambatan

b. Daftar Peraturan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang rumpun Jabatan Fungsional PNS

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai negeri sipil.

Peraturan Badan Kepegawaian Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Kementerian

Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi, Kementerian Desa, PDTT Nomor 388 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penggerak swadaya Masyarakat katagori Keahlian

Peraturan Ketua Stia Lan Jakarta. Nomor: 111/Stia/Hks,02,1/2017. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Sarjana Terapan STIA LAN Jakarta